

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam mengeksplorasi proses rekrutmen calon kepala daerah oleh Partai Golkar pada Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020, temuan dan analisis yang telah dikemukakan sepanjang penelitian ini menyoroti berbagai aspek yang krusial dalam dinamika internal partai. Kesimpulan ini memberikan gambaran tentang bagaimana Partai Golkar melakukan rekrutmen calon kepala daerah untuk mengikuti kontestasi Pilkada serentak di Kota Tangerang Selatan tahun 2020.

Konsep yang dikemukakan oleh Hazan dan Rahat dalam metode seleksi kandidat merupakan faktor penting dalam demokrasi partai secara internal. Konsep yang diajukan tersebut untuk menilai dan membedakan metode seleksi kandidat yang ada di berbagai negara. Untuk studi kasus Partai Golkar, proses rekrutmen calon kepala daerah yang dijalankan oleh Partai Golkar dapat dilihat dan dinilai dari empat dimensi yang diajukan oleh Hazan dan Rahat, yaitu selektorat, kandidasi, desentralisasi, dan voting vs penunjukkan.

Pertama, proses selektorat dalam seleksi calon kepala daerah oleh Partai Golkar menyoroti adanya kecenderungan eksklusifitas, khususnya dalam peran kepanitiaan di tingkat daerah dan nasional. Komite nominasi, khususnya Tim Seleksi Pilkada Pusat di tingkat nasional, memainkan peran sentral dalam menyaring dan menentukan calon yang akan diusung. Keputusan strategis dalam menilai dan menyaring calon kandidat, yang seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi internal partai dengan melibatkan anggota partai dan unsur terbawah seperti kelurahan dan kecamatan, ternyata lebih banyak ditentukan oleh elit di tingkat daerah dan nasional. Terlihat bahwa sentralisasi keputusan yang dominan dalam proses rekrutmen calon kepala daerah oleh Partai Golkar menciptakan ketidakseimbangan dalam partisipasi anggota partai di tingkat lokal.

Ini juga menunjukkan kurangnya demokrasi internal di tingkat daerah. Partisipasi anggota partai di tingkat lokal menjadi terbatas karena keputusan utama sudah diambil di tingkat pusat. Sehingga, terdapat ketidakmerataan dalam pengaruh dan kontribusi anggota partai di berbagai tingkatan kepengurusan.

Kedua, proses kandidasi calon kepala daerah oleh Partai Golkar menunjukkan kecenderungan yang lebih condong ke arah eksklusivitas dengan adanya beberapa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi. Eksklusivitas ini tercermin dalam persyaratan yang dominan terhadap anggota partai dan pertimbangan terhadap popularitas serta elektabilitas calon. Terlihat dari beberapa syarat dan prioritas seperti pemberian hak kader, syarat khusus calon, dan pertimbangan terhadap popularitas dan elektabilitas, menunjukkan bahwa partai lebih fokus pada dinamika internalnya sendiri dan memiliki kecenderungan terbatasnya partisipasi warga negara umum dalam proses kandidasi. Dari hasil analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada faktor lain dalam menentukan figur yang akan diusung pada Pilkada yang telah menciptakan batasan dan kendala bagi calon dari luar lingkungan partai. Dengan kata lain, penekanan pada popularitas dan elektabilitas sebagai syarat kandidasi dapat dianalisis sebagai strategi partai untuk memastikan bahwa figur yang diusung memiliki daya tarik yang tinggi di mata publik. Namun, hal ini juga dapat dianggap sebagai kendala demokratisasi, karena lebih mengedepankan aspek-aspek tertentu dan mengabaikan potensi calon dari kalangan masyarakat yang tidak memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi.

Ketiga, dalam dinamika rekrutmen calon kepala daerah oleh Partai Golkar, terlihat adanya kecenderungan sentralisasi dalam proses yang seharusnya bersifat desentralisasi. Meskipun terdapat upaya untuk mendesentralisasi ke tingkat lokal, seperti pelibatan peran DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota, struktur dan mekanisme rekrutmen masih memberikan pengaruh yang dominan kepada pusat, khususnya DPP Partai Golkar. Peran DPD provinsi dan DPD kabupaten/kota tampaknya lebih bersifat administratif dan sosialis. Posisi dominan Tim Seleksi Pilkada Pusat yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP memastikan bahwa

keputusan akhir dan evaluasi terhadap calon tetap berada di tangan pusat. Sentralisasi keputusan di tingkat pusat, khususnya di DPP Partai Golkar, menunjukkan ketidakmerataan partisipasi dan pengambilan keputusan di antara tingkatan partai. Sebagai hasilnya, rekrutmen calon kepala daerah menjadi kurang demokratis dan lebih terfokus pada kontrol pusat, merugikan partisipasi anggota di tingkat lokal. Analisis ini mendukung pandangan bahwa sentralisasi dalam proses rekrutmen menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang dapat merugikan demokrasi internal partai dan mengurangi representasi serta pluralitas dalam penentuan calon kepala daerah.

Terakhir, Partai Golkar cenderung lebih mengutamakan mekanisme penunjukan daripada melibatkan pemilihan melalui voting umum dalam menentukan calon yang akan diusung. Proses evaluasi internal, penilaian kualitatif, dan aspirasi internal partai menjadi faktor penentu yang lebih dominan dalam menentukan siapa yang layak menjadi calon kepala daerah. Meskipun proses penunjukan dapat memberikan kepastian terkait kualitas, popularitas, dan kompetensi calon, namun juga dapat menciptakan suatu dinamika yang kurang demokratis. Penekanan Partai Golkar pada mekanisme penunjukan calon kepala daerah menandakan adanya preferensi terhadap kendali internal dan otonomi dalam mengarahkan kebijakan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, evaluasi internal dan penilaian kualitatif menjadi faktor penentu, menunjukkan orientasi partai pada aspek kualitatif daripada mekanisme demokratis tradisional seperti pemilihan umum. Meskipun mekanisme ini dapat memberikan kepastian terkait kualitas dan kompetensi calon, namun juga membawa risiko kekurangan aspek demokratis dalam proses tersebut. Dengan demikian, meskipun penunjukan dapat memberikan stabilitas dan ketegasan, perlu diwaspadai bahwa pendekatan ini dapat merugikan demokrasi internal partai dan menciptakan ketidaksetaraan dalam proses penetapan calon kepala daerah.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Dari hasil penelitian ini, beberapa saran praktis dapat diajukan untuk meningkatkan demokrasi internal dalam proses rekrutmen calon kepala daerah oleh Partai Golkar. Saran ini ditujukan untuk Partai Golkar yang menjadi objek penelitian dan partai politik lain yang diharapkan mulai menerapkan demokrasi di dalam internal partai sebagai contoh pelaksanaan demokrasi nasional, terutama saat menjalankan rekrutmen calon kepala daerah.

Pertama, perlu adanya upaya untuk meningkatkan inklusivitas dalam proses kandidasi. Ini dapat dicapai dengan mengurangi persyaratan tambahan yang bersifat membatasi, sehingga memungkinkan setiap anggota partai memiliki kesempatan yang lebih merata untuk mencalonkan diri. Peninjauan kembali syarat khusus calon dan pertimbangan terhadap popularitas dan elektabilitas perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses kandidasi mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih inklusif.

Kedua, perlu diperkuat peran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dalam menentukan calon kepala daerah secara lebih mandiri. Desentralisasi yang lebih signifikan dapat mendorong partisipasi aktif dari tingkat lokal, sehingga keputusan strategis tidak hanya ditentukan oleh elit di tingkat daerah dan nasional. Pemberian kewenangan lebih besar kepada DPD dalam menilai potensi calon dari wilayahnya akan menciptakan proses rekrutmen yang lebih responsif terhadap dinamika lokal.

Ketiga, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi keterlibatan Tim Seleksi Pilkada Pusat di tingkat nasional. Langkah-langkah fundamental menuju desentralisasi yang lebih signifikan, dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada DPD dalam menentukan calon kepala daerah secara lebih mandiri, dapat menciptakan proses rekrutmen yang lebih demokratis. Melalui implementasi saran-saran praktis ini, diharapkan Partai Golkar dapat memperkuat prinsip-prinsip demokrasi internalnya dalam proses rekrutmen calon kepala daerah.

Terakhir, menimbang kembali penggunaan pendekatan penunjukan yang terpusat, dengan mempertimbangkan lebih banyak partisipasi basis partai, dapat menjadi langkah krusial. Mekanisme penunjukan yang lebih terbuka dan melibatkan partisipasi aktif dari basis partai dapat menciptakan proses yang lebih demokratis dan merefleksikan keinginan dan aspirasi seluruh anggota partai. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Partai Golkar dapat mengoptimalkan praktik demokrasi internalnya dalam rekrutmen calon kepala daerah, menciptakan proses yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan seluruh struktur partai.

5.2.2 Saran Teoritis

Dalam menguraikan kekurangan penelitian yang perlu menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut, penelitian ini masih dapat ditingkatkan dalam beberapa aspek.

Pertama, dalam konteks rekrutmen calon kepala daerah oleh Partai Golkar, penelitian ini terbatas pada Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020. Sebagai hasilnya, generalisasi temuan menjadi terbatas pada konteks tersebut. Penelitian lebih lanjut dapat melibatkan Pilkada dari wilayah yang berbeda atau bahkan partai politik lain.

Kedua, penelitian ini banyak berbicara tentang deskripsi proses rekrutmen dan belum terlalu mendalam dalam melakukan analisis terkait dampaknya terhadap demokrasi internal partai. Sebagai langkah lebih lanjut, penelitian selanjutnya dapat memperdalam pemahaman terkait bagaimana dinamika rekrutmen berdampak pada dinamika demokrasi internal partai politik.

Ketiga, penelitian ini belum secara rinci membahas peran dan persepsi anggota partai serta masyarakat dalam proses rekrutmen calon kepala daerah. Menguatkan analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait dengan dinamika internal partai dan dampaknya pada partisipasi politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian lebih

lanjut dapat melibatkan pendekatan yang lebih partisipatif, seperti wawancara mendalam atau studi kasus yang fokus pada pengalaman individu dalam proses rekrutmen.

Dengan demikian, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, saran teoritis dalam penelitian lebih lanjut dapat ditekankan pada pengembangan model analisis yang lebih kritis dan kontekstual terkait dengan dampak eksklusivitas dalam rekrutmen terhadap demokrasi internal partai politik. Melalui penelitian ini, beberapa saran teoritis dapat diusulkan untuk mengembangkan pemahaman tentang demokrasi internal partai politik, khususnya dalam konteks Partai Golkar.

Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki pengaruh eksklusivitas dalam demokrasi internal partai terhadap dinamika politik lokal. Hal ini dapat mencakup analisis mendalam terkait konsekuensi dari dominasi elite di tingkat daerah dan nasional terhadap partisipasi anggota partai dan responsivitas partai terhadap aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, perbandingan dengan penelitian sejenis dari partai politik lainnya dapat memberikan kontribusi signifikan pada literatur tentang sistem internal partai politik di Indonesia. Dengan membandingkan praktik demokrasi internal Partai Golkar dengan partai lain, kita dapat mengidentifikasi pola umum atau perbedaan yang mungkin memengaruhi efektivitas demokrasi internal.

Terakhir, penelitian lanjutan yang mendalam ke konsep desentralisasi dalam demokrasi internal partai. Dalam konteks Partai Golkar, perlu dipelajari lebih lanjut tentang dampak desentralisasi yang lebih signifikan terhadap proses rekrutmen calon kepala daerah. Apakah pemberian kewenangan lebih besar kepada tingkat lokal benar-benar menghasilkan proses yang lebih inklusif dan responsif?. Lalu, apakah terdapat tantangan atau hambatan dalam menerapkan desentralisasi tersebut? Dengan menggali lebih dalam konsep-konsep ini, penelitian lanjutan dapat memberikan wawasan teoritis yang lebih mendalam dan merinci tentang

bagaimana demokrasi internal partai politik dapat diimplementasikan dan diperkuat, khususnya dalam konteks politik lokal di Indonesia.